

PERGURUAN TINGGI SEBAGAI MEDAN BAKTI UNTUK LEBIH MENINGKATKAN PEMBINAAN KESATUAN BANGSA.

Oleh : Prof. Dr. A. Mukti Ali *)

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Syukur Alhamdulillah bahwa Studi Purna Sarjana (SPS) Dosen-Dosen IAIN se Indonesia Angkatan ke IV dapat dibuka pada pagi hari ini.

Mengapa "Ilmu Sejarah" dan mengapa "Ilmu Filsafat" yang diberikan dalam SPS ini, telah pernah kami berikan alasan-alasannya pada pembukaan SPS-SPS yang lalu. Demikian juga mengapa "Penelitian Sosial dan Agama" juga sudah kami berikan pada pembukaan SPS-SPS yang lalu. Bahkan metodologinya juga sudah kita bahas; dan SPS Angkatan ke II telah dapat menyusun sebuah monograph tentang Pengantar Metodologi Penelitian Agama, yang dari SPS demi SPS metodologi penelitian Agama itu akan terus dibahas dan disempurnakan.

Oleh karena itu, semua itu tidak akan kami uraikan disini.

Peningkatan Pembinaan Kesatuan Bangsa.

Satu hal yang kami rasa harus mendapat perhatian kita bersama, terutama bagi kita yang memilih perguruan tinggi sebagai medan baktinya, ialah usaha kita bersama untuk lebih meningkatkan Pembinaan Kesatuan Bangsa Kesatuan bangsa yang utuh dan tunggal harus kita bina. Tanpa kesatuan yang utuh dan tunggal, "Indonesia" tidak ada artinya sama sekali. Jangankan kita akan bicara soal pembangunan! Pembangunan hanya akan merupakan omongan yang kosong belaka, tanpa adanya kesatuan bangsa yang utuh dan tunggal itu.

Dasar kesatuan bangsa itu telah kita sepakati bersama ialah Pancasila. Dan oleh karena itu, maka untuk mencapai kesatuan bangsa yang utuh dan tunggal kita harus berusaha meyakini akan kebenaran Pancasila itu, mengamalkan dan menghayati Pancasila itu.

Sebagai seorang Muslim, marilah kita berusaha supaya menjadi Muslim yang baik, dan dalam waktu yang sama berusaha untuk menjadi warga negara Indonesia yang baik. Dan bagi Saudara-saudara yang beragama Kristen Protestan atau Katolik, berusahalah untuk menjadi orang Kristen Protestan atau Katolik yang baik, dalam waktu yang sama berusaha untuk menjadi warga negara Indonesia yang baik. Demikian juga bagi Saudara-saudara yang beragama Hindu atau Budha, berusahalah untuk menjadi orang Hindu atau Budha yang baik, dan dalam waktu yang sama berusahalah untuk menjadi warga negara Indonesia yang baik.

Inilah sebabnya, maka dalam kesempatan ini kami ingin membahas tentang Pancasila, dengan harapan kiranya dapat menjadi bahan renungan bagi Saudara-saudara peserta SPS.

*) Sambutan beliau selaku Menteri Agama R.I. pada pembukaan Studi Purna Sarjana (SPS) Dosen-dosen IAIN se-Indonesia Angkatan ke IV Tanggal 2 Juli 1977 di Yogyakarta.

Pancasila dan pendekatannya.

I. Pancasila adalah merupakan ideologi negara. Sebagai suatu bangsa yang harus mempertahankan dan mengisi kemerdekaannya dan ingin kuat dan kekal hidupnya harus mempunyai filsafat hidup dan landasan sebagai pegangan bagi bangsa tersebut. Dengan berpegang kepada landasan filsafat hidup, bangsa itu akan dapat berdiri tegak dan tidak akan terombang-ambing dalam perjalanannya menuju cita-cita nasionalnya, karena landasan filsafat itu memberikan dasar dan sekaligus juga tujuan yang hendak dicapai. Landasan filsafat negara itu kadang-kadang disebut ideologi, kadang-kadang disebut dasar negara.

II. Pengertian tentang ideologi adalah bermacam-macam. Dalam uraian ini yang dimaksud dengan ideologi adalah:

Keyakinan pokok yang dijadikan dasar serta memberikan arah untuk dicapai dalam melaksanakan dan mengembangkan hidup dan kehidupan nasional suatu bangsa dan negara.

Aspek-aspek hidup dan kehidupan suatu bangsa adalah sangat kompleks, oleh karena itu ideologi suatu bangsa itu tidak cukup tercetus dalam suatu nilai saja, tetapi memerlukan penjabaran dalam beberapa nilai. Rangkaian nilai itu seringkali disebut sistem nilai. Oleh karena itu ideologi atau filsafat hidup bangsa itu merupakan suatu sistem nilai, yaitu serangkaian nilai-nilai yang tersusun secara sistematis serta merupakan suatu kebulatan ajaran atau doktrin.

III. Ideologi atau filsafat hidup bangsa itu dapat hidup dan berkembang apa bila ideologi itu dapat memenuhi aspirasi hidup dan kehidupan rakyat bangsa itu. Dan ideologi atau filsafat hidup bangsa itu dapat memenuhi aspirasi dan kehidupan rakyatnya apabila rangkaian nilai-nilai yang menjadi ideologi atau filsafat hidup bangsa itu benar-benar hidup dikalangan masyarakat bangsa itu. Oleh karena itu ideologi atau filsafat hidup bangsa itu tidak bisa diimport dari luar dan tidak bisa dipaksakan dari luar. Ideologi atau filsafat hidup bangsa itu adalah merupakan rangkaian nilai yang hidup ditengah-tengah masyarakat.

IV. Pancasila yang dirumuskan didalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945, yang menjadi ideologi dan filsafat hidup bangsa adalah hidup dalam ilwa rakyat dalam bentuk-bentuk yang kita kenal bersama. Oleh karena itu bentuk-bentuk tersebut kita akui dan dituangkan dalam rumusan Pancasila yang menjadi ideologi dan dasar filsafat hidup negara.

V. Pembahasan tentang pengamalan Pancasila seringkali bahkan menimbulkan kekecewaan. Hal ini disebabkan karena adanya kontradiksi—kontradiksi antara "pengertian" Pancasila dan "pengamalan" Pancasila, atau kontradiksi penghayatan terhadap persoalan "abstract spirituil" di satu pihak dan "konkrit sensuil" di lain pihak. Pola abstract spirituil seringkali disebut "das Sollen", sedang pola konkrit sensuil sering disebut dengan "das Sein" Pancasila sebagai ideologi spirituil karena itu disebut "das Sollen".

Pembahasan "das Sollen" memberikan petunjuk—petunjuk tentang isi maksud "das Sollen" itu. Pembahasan tentang pengamalan Pancasila adalah suatu pembahasan tentang bagaimana agar supaya "das Sollen", yaitu Pancasila, menjadi "das Sein" yang merupakan penjabaran Pancasila itu dalam kehidupan

sehari-hari bangsa Indonesia. Di sini orang memahami bahwa penjabaran Pancasila dalam kehidupan sehari-hari bangsa Indonesia kadang-kadang tidak sesuai dengan isi dan maksud Pancasila itu sendiri. "Das Sein" tidak cocok dengan "das Sollen". Disinilah timbulnya kekecewaan.

VI. Selain dari pada itu Pancasila sebagai Ideologi adalah juga merupakan "Idealisme" yang harus dituju oleh kehidupan rakyat dan bangsa Indonesia. Berusaha untuk mendekati Idealisme itu adalah merupakan keharusan bagi bangsa Indonesia. Dengan itu maka Ideologi Pancasila juga merupakan daya "pendidik" yang mendidik rakyat dan bangsa Indonesia, baik sebagai individu maupun sebagai bangsa untuk menuju menjadi manusia Indonesia yang ideal yaitu manusia Pancasilais. Usaha manusia Indonesia yang dilkat oleh waktu, tempat dan keadaan sekitarnya, menuju kearah pengamalan Pancasila yang universal itu adalah sudah merupakan usaha yang baik. Kesempurnaan nisbi harus selalu diusahakan. Kalau demikian halnya, yaitu bahwa kekecewaan itu timbul dalam usaha menjabarkan das Sollen dalam kenyataan hidup, maka kekecewaan itu bahkan akan berubah menjadi perangsang untuk meningkatkan usaha guna mencapai das Sollen didalam kenyataan.

VII. Pancasila yang terdiri dari lima sila itu adalah merupakan kesatuan tunggal. Satu sama lain saling kait mengkait yang sangat erat dan saling hubung—menghubungkan yang tidak dapat dipisahkan hingga merupakan satu kesatuan yang tunggal. Pancasila, yang sila pertamanya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, hanya dapat dibahas dengan pangkal tolak beragama baik pembahasan itu dilaksanakan secara deduktif, dari Ketuhanan Yang Maha Esa menuju kepada sila-sila lainnya, maupun dilaksanakan secara induktif, dari sila ke lima menuju ke sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pangkal tolak kepercayaan dalam agama merupakan pokok tolak yang fundamental, aksiomatis yang logis, sekalipun mungkin sebagai dianggap dogmatis. Pancasila yang merupakan kesatuan yang tunggal itu pembahasannya harus secara menyeluruh pula: artinya tidak bisa dibahas secara "synthesis konstruktif". Pembahasan Pancasila secara synthesis konstruktif pasti tidak akan sampai pada tujuan pembahasan Pancasila itu karena kesatuan selalu melebihi jumlah bagian-bagiannya bagaimanapun lengkapnya bagian-bagian tersebut.

Selain daripada itu karena Pancasila adalah merupakan ideologi spiritual maka tidak mungkin secara tepat dibahas atas dasar materialisme. Materialisme tidak mempunyai tempat dalam Pancasila.

Demikian pula oleh karena Pancasila adalah merupakan kebenaran kepercayaan maka tidak mungkin ilmu pengetahuan dapat membahas Pancasila secara lengkap. Pembahasan ilmiah hanya dapat dilakukan pada bagian-bagian yang dapat dibahas ilmiah saja. Dan tiap pembahasan ilmiah akan selalu meninggalkan bagian-bagian yang tidak mungkin dapat dibahas selanjutnya oleh karena kesatuan selalu melebihi konstruksi synthesis.

Hal ini tidak perlu mengambat orang untuk membahas Pancasila secara ilmiah. Karena pembahasan ilmiah akan meningkatkan kejelasan dalam pengertian dan menghilangkan keragu-raguan, dan lambat laun pengertian itu akan menjadi lebih tegas dan dengan itu kehidupan menjadi lebih dipercaya. Pancasila akan menjadi lebih diperkaya dan dinamis kalau apa yang dapat dibahas secara ilmiah dapat dibahas dan menjadi lebih jelas pula.

PEMBAHASAN.

I. Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dasar Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi dasar yang memimpin cita-cita kenegaraan kita untuk menyelenggarakan segala yang baik bagi rakyat dan masyarakat. Dengan itu maka tingkah laku masyarakat negara Indonesia mendapat dasar moral yang kuat. Ketuhanan Yang Maha Esa tidak hanya menjadi dasar hormat—menghormati bagi pemeluk agama yang satu pada lainnya, melainkan menjadi dasar yang memimpin kejalan kebenaran, keadilan, kebaikan, kejujuran dan persaudaraan. Dengan dasar—dasar itu sebagai pimpinan dan pegangan, pemerintahan negara pada hakekatnya tidak boleh menyimpang dari jalan yang lurus untuk mencapai kebahagiaan rakyat dan keselamatan masyarakat, perdamaian dunia serta persaudaraan bangsa—bangsa. Memang didalam pembukaan Undang—Undang Dasar 1945 itu dijelaskan bahwa gunanya Pancasila adalah untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Dengan bimbingan dasar—dasar yang tinggi itu maka disusunlah Undang—Undang Dasar 1945 yang menjadi sendi politik negara dan politik pemerintah. Karena sila Ketuhanan Yang Maha Esa yang menghidupkan perasaan yang murni maka terdapatlah pasangan yang harmonis antara kelima ilmu sila itu. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa mendorong rakyat dan bangsa Indonesia untuk berbuat dalam kehidupan sehari—hari menurut sifat—sifat yang dipujikan pada Tuhan Yang Maha Esa seperti kasih sayang, adil dan sebagainya. Ketuhanan Yang Maha Esa mewajibkan bangsa Indonesia dalam kehidupannya membela kebenaran dengan menentang segala yang dusta, membela keadilan dengan menentang kezaliman, berbuat yang baik dan memperbaiki kesalahan, berbuat jujur dan membasmi kecurangan.

Ketuhanan Yang Maha Esa mewajibkan bangsa Indonesia berlaku suci dengan menentang segala kekotoran menikmati keindahan dengan melenyapkan segala yang buruk.

Semua sifat-sifat tersebut yang harus diamlakan adalah karena bangsa Indonesia mengakui dan berpegang kepada dasar Ketuhanan Yang Maha Esa dan menerima bimbingan dari Zat Yang Maha Sempurna.

Dengan itu maka Ketuhanan Yang Maha Esa mengandung pengertian kepercayaan bangsa Indonesia tentang adanya Tuhan Yang Maha Esa, sebab pertama dari segala yang ada (prima causa), Maha kuasa, Maha Pengasih, dan sifat-sifat kesempurnaan yang lain. Sifat-sifat itu tercermin dalam wujudnya alam semesta, yang manusia adalah ciptaanNya yang paling sempurna, diserahi mengatur, membina dan mengembangkan alam ini atas namaNya. Dengan pengertian atas namaNya ini, maka segala aspek tindakan manusia harus sesuai dengan kehendakNya, ketentuan-ketentuanNya, dan serasi dengan sifat-sifat kesempurnaanNya.

Hal ini dapat dirumuskan dalam pengertian "taqwa" kepada Tuhan Yang Maha Esa. Taqwa disini berarti sampai dimana manusia itu memperoleh peserta keyakinan agama dan sampai dimana manusia mampu mendisiplin dirinya sendiri mengamalkan ajaran-ajaran agama yang diyakininya, sehingga dapat memancarkan manfaat untuk dirinya dan masyarakatnya dan sampai dimana manusia mampu menjauhkan dirinya dari larangan-larangan Tuhan Yang Maha Esa, sehingga terhindar dari malapetaka yang merugikan dirinya sendiri dan masyarakat, baik masa kini maupun masa nanti, dunia dan akhirat.

Dengan kepercayaan ini manusia akan menyadari keterbatasannya, bahwa ada yang lebih kuasa diatas kekuasaan dirinya, sehingga menjadi dorongan untuk berbuat adil, jujur dan tidak sewenang-wenang terhadap sesamanya, dan menimbulkan kesadaran atas dasar keterbatasannya bahwa hidup dan kehidupan manusia ini mempunyai ketergantungan kepada yang Ghaib dan kepada sesama manusia.

Karena dorongan percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, bangsa Indonesia yakin dan berkeyakinan bahwa Tuhan Yang Maha Esa akan memberi bimbingan dalam segala gerak perjuangannya menuju masyarakat yang makmur dan berkeadilan sosial.

Sila Ketuhanan Yang Maha Esa mencerminkan sifat bangsa Indonesia yang percaya bahwa ada kehidupan lain dihari kemudian setelah kehidupan di dunia sekarang ini. Hal ini mendorong bangsa Indonesia untuk berlomba mengejar nilai-nilai luhur yang akan membuka jalan untuk mencapai kehidupan yang bahagia kini dan dimasa yang akan datang (akhirat)

Atas dasar keyakinan ini, maka bangsa Indonesia mengakui dan menghormati hak-hak asasi manusia, sebagai suatu hak yang wujud bersama wujudnya manusia itu sendiri sebagai makhluk Tuhan seperti : hak hidup, hak kemerdekaan, hak menyatakan pendapat, hak untuk mencapai taraf kehidupan yang layak, hak kebebasan memeluk agama dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu, sebagaimana tersebut dalam pasal 27, 28, 29, 30, 31 32, 33 dan 34 Undang-Undang Dasar 1945.

Pernyataan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa oleh bangsa Indonesia tercermin dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke 3 : "Atas berkat rahmat Tuhan Yang Kuasa maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya". Hal ini mengandung pengertian bahwa kemerdekaan yang diperoleh bangsa Indonesia pada hakekatnya adalah berkat dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa terhadap perjuangan bangsa Indonesia.

Batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat 1 menyatakan bahwa "Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa". Ayat ini mengandung pengertian bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pasal 29 ayat 2 menyatakan bahwa : "Negara menjamin kemerdekaan tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu".

Ayat ini mengandung arti :

- a. Bahwa negara menjamin kebebasan memilih agama dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu, berarti negara melarang pemaksaan memeluk suatu agama dan paksaan meninggalkan agamanya, demikian juga melarang kebebasan tidak memilih agama.
- b. Kebebasan seorang memilih agama dan menyilarkan agamanya terbatas dengan kebebasan orang lain. Oleh karena itu jaminan kebebasan memilih agama mengandung makna untuk saling menghormati antara sesama pemeluk agama yang selanjutnya dapat diciptakan dan dibina kerukunan antar ummat beragama. Dan dengan kerukunan itu diharapkan dapat berkembang usaha bersama untuk pembangunan dan kemajuan sejauh yang diidhai oleh Tuhan Yang Maha Esa.

Ajaran pokok yang terkandung dalam sila Ketuhanan Yang Maha Esa adalah bahwa Tuhan itu adalah Esa. Akibat daripada ajaran tentang Keesaan Tuhan itu ialah bahwa ummat manusia adalah satu. Ia diciptakan dari seorang belaka. Memang manusia itu tidak seragam dalam segala segi dan aspeknya, tetapi dalam azasnya manusia seluruhnya adalah satu dan bersaudara.

II. Inilah sebabnya mengapa sila yang kedua Pancasila itu adalah *Kemanusiaan yang adil dan beradab*.

Hidup yang berazaskan Kemanusiaan Yang Adil dan beradab itu sebenarnya merupakan akibat daripada pengamalan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemanusiaan yang adil dan beradab itu adalah bersifat universal dan oleh karena itu maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban azasi manusia harus dilindungi.

III. Sila *Persatuan Indonesia* sebenarnya merupakan bagian dari sila Kemanusiaan yang adil dan beradab. Penghayatan terhadap Persatuan Indonesia ini, yang seolah-olah membatasi Kemanusiaan yang sifatnya universal, disebabkan oleh penghayatan terhadap kehidupan yang riil, misalnya keturunan biologis, kebutuhan yang sama, sejarah dan nasib yang sama, bahasa dan kebudayaan yang berdekatan, dan prospektif kehidupan yang sama. Faktor-faktor tersebut diatas menentukan kebangsaan yang menyebabkan satu bangsa berbeda dengan lainnya, dan faktor-faktor tersebut diatas menentukan kekuatan kesatuan kelompok manusia. Hal itu tidak bertentangan dengan ajaran agama yang menekankan kepada kesatuan manusia, karena pembatasan tersebut merupakan pula realisasi yang lebih konkrit yang diperhalus, karena realisasinya itu adalah dalam kerangka kemanusiaan yang adil dan beradab.

IV. *Kebijaksanaan yang dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan* dalam Permusyawaratan/Perwakilan adalah kerakyatan dilaksanakan diatas dasar kebenaran, keadilan, kebajikan, kejujuran, kesucian dan keindahan. Kerakyatan dimaksud bukanlah kerakyatan yang mencari suara terbanyak saja, tetapi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.

Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan adalah erat sekali hubungannya dengan sila Keadilan Sosial, yakni untuk mewujudkan keadilan Sosial bagi seluruh rakyat.

Hak-hak azasi manusia mengenal kemerdekaan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran dan tulisan diatur dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945.

Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan adalah galian dari kebudayaan bangsa Indonesia sendiri, yang bersifat kekeluargaan, gotong royong, musyawarah untuk mufakat.

V. Sila kelima Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Selain menjadi dasar negara juga menjadi tujuan yang harus dilaksanakan. Dalam pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa "tiap-tiap warganegara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan". Dengan perkataan lain barangkali dapat dikatakan bahwa "Kerakyatan" adalah merupakan sistem pelaksanaan sila-sila daripada Pancasila, sedangkan "Keadilan Sosial" adalah merupakan sistem norma-norma

terhadap pelaksanaan tersebut, untuk mengukur apakah pelaksanaan tersebut benar—benar dilaksanakan. Oleh karena itu maka sila kelima erat sekali hubungannya dengan kontrol sosial, dan untuk melaksanakan kontrol sosial yang baik maka tentu memerlukan "peradilan". Dan peradilan ini sesuai dengan azas—azas dalam Pancasila maka sifatnya harus bebas dan terbuka.

Dengan itu maka hubungan antara kerakyatan sebagai sistem operasional, keadilan sosial sebagai sistem normatif dan peradilan bebas terbuka sebagai penyelesaian, yang dilakukan dalam semangat dan jiwa kemanusiaan yang adil dan beradab dengan selalu mengingat dan menjaga keutuhan dan kesatuan bangsa, maka itulah merupakan syarat mutlak untuk mencapai Indonesia makmur lahir dan batin yang diidhah oleh Allah Tuhan Yang Maha Esa.

PENGAMALAN.

Telah diuraikan bahwa bangsa yang bernegara harus memiliki landasan filsafat, filsafat negara atau ideologi. Ideologi itu harus bukan merupakan rangkaian nilai yang asing bagi bangsa itu.

Untuk kejayaan dan kebesaran bangsa. Ideologi itu harus dihayati dan diamalakan. Oleh karena itu harus selalu diusahakan agar bangsa Indonesia mau melaksanakan ideologinya. Dan untuk itu maka ketaatan dan kesadaran untuk melaksanakan dasar filsafat negaranya perlu ditanamkan.

Pada garis besarnya ada dua macam pengamalan atau pelaksanaan Pancasila itu, yaitu pengamalan obyektif dan pengamalan subyektif. Pengamalan obyektif adalah pengamalan oleh pemerintah beserta segenap aparaturnya dan lembaga—lembaga kenegaraan, suatu pengamalan berdasarkan dan sesuai dengan maksud, isi dan jiwa Pancasila secara bulat, utuh sehingga segala bentuk kebijaksanaan yang dituangkan dalam peraturan perundangan harus sejalan dan senafas dengan isi dan makna Pancasila.

Selain daripada itu pelaksanaan dasar negara itu harus pula dilaksanakan oleh perorangan sebagai warganegara baik ia penguasa atau bukan penguasa. Ini adalah pengamalan obyektif.

Bagi umat beragama pelaksanaan Pancasila adalah bukan merupakan soal, karena hal itu hanya merupakan pelaksanaan daripada ajaran agama yang mereka anut.

Dengan ini kami membuka Studi Purna Sarjana Dosen—Dosen IAIN se—Indonesia Angkatan ke IV dengan bersama—sama membaca :

"BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM"

Sekian, terima kasih.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.